

Etika Anak Bangsa Perspektif Pancasila

Abdul Basir Solissa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

abdul.solissa@uin-suka.ac.id

Abstract

Pancasila as the basis of the State, the state ideology, and the nation's view of life are national agreement and national compromise of various interest groups. Pancasila was agreed as a final meeting point, therefore Pancasila must be the starting point in overcoming all problems of national and state life. One of the complicated problems that are currently happening is Indonesian community behavior that is already not in line with the Pancasila values. In this context Pancasila must be placed not only as the basis of the State, the state ideology, and the nation's view of life, but also must be the basis of ethics, the value standard, and the moral standards. This article examines the three main areas that become the pulse of the life of the nation, that is politics, economics and social media. The behavior of the Indonesian community in the three main streams, read from the Pancasila perspective, therefore expected to give birth to a new awareness in the rule of a nation which is more balanced, humane and enlightening.

Keywords: *Pancasila. Etict, the Indonesian community*

Abstrak

Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi Negara dan pandangan hidup bangsa adalah kesepakatan nasional dan kompromi nasional di atas tarik menarik berbagai kelompok kepentingan. Pancasila disepakati sebagai titik temu yang bersifat final alias harga mati. Karena Pancasila adalah titik temu maka Pancasila pula yang harus menjadi titik berangkat dalam mengatasi semua persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu persoalan pelik yang

kini dihadapi bangsa Indonesia adalah perilaku anak bangsa yang dirasakan sudah keluar dari nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini maka Pancasila harus diletakkan tidak hanya sebagai dasar Negara, ideologi Negara dan pandangan hidup bangsa tetapi Pancasila juga harus menjadi landasan etik, standar nilai dan patokan moral. Dalam artikel ini disoroti tiga bidang utama yang menjadi arus nadi kehidupan berbangsa yaitu politik, ekonomi dan sosial media. Perilaku anak bangsa dalam ketiga arus utama itu dibidik dari perspektif Pancasila sehingga diharapkan dapat melahirkan kesadaran baru dalam tata perilaku bangsa yang lebih berimbang, manusiawi dan mencerdaskan.

Kata Kunci: Pancasila, Etika, Anak bangsa.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah nama yang disandangkan pada sebuah kawasan yang secara alamiah telah terbentuk jauh sebelum nama itu dipergunakan. Kawasan tersebut oleh kalangan peneliti dan ilmuwan asing atau bahkan para penjajah memberi nama yang bermacam-macam sesuai temuan dan kepentingan mereka. Pada umumnya kawasan ini dikenal dengan nama nusantara sebagai bentangan kepulauan dengan beragam etnis, budaya, agama, bahasa dan adat istiadat.¹ Itulah sebabnya Indonesia hadir tidak dari titik nol tetapi sudah membawa dan mewarisi sejuta problematika yang kompleks. Keragaman tersebut merupakan salah satu warisan bawaan yang membuat kawasan ini menjadi istimewa di mata dunia. Indonesia patut bersyukur bahwa keragaman yang dimilikinya merupakan potensi dasar keunggulan karena tidak semua bangsa di dunia memiliki kondisi yang sama. Keragaman itu adalah anugerah yang tidak ternilai harganya tetapi bersamaan dengan itu juga terkandung problematika yang laten. Keragaman itu menjadi keunggulan bila mana dikelola dengan cara yang benar sehingga menjadi sebuah simphony yang menghasilkan bunyi dan nada yang serasi. Dalam hal ini, nada itu menuju satu arah yang dicita-citakan bersama, yaitu keadilan dan kemakmuran. Di sisi lain, keragaman itu sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ledakan yang dahsyat bilamana dikelola dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Keragaman itu menyimpan potensi disharmoni, konflik, disintegrasi bahkan perang saudara sebagaimana dipertontonkan oleh sebagian bangsa di belahan dunia yang lain.

¹ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya; Kajian Sejarah Terpadu. Bag. 2: Jaringan Asia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 13.

Menyadari kondisi itulah yang mendorong para pendiri bangsa ini untuk mencari titik pijak yang dapat menjadi komitmen bersama dari seluruh anak bangsa. Pijakan itu yang kini kita kenal dengan Pancasila. Upaya untuk menghadirkan Pancasila bukan tanpa perjuangan, Pancasila bukan jatuh dari langit, Pancasila dirumuskan dari jati diri bangsa yang telah beratus tahun teraktualisasi bahkan terpendam jauh dalam kepribadian bangsa majemuk yang akhirnya disebut sebagai Indonesia. Dalam konteks itulah maka perjuangan untuk menghadirkan Pancasila menjadi sangat kompleks karena di satu sisi harus mencari kesamaan dasar dari kemajemukan yang ada dan pada waktu yang bersamaan ia harus mempunyai kekuatan prediktif sehingga mampu membaca dan menghadapi tantangan masa depan. Itulah yang dimaksud oleh Soekarno bahwa Pancasila sebagai dasar statis dan leitstar dinamis.² Pancasila yang kemudian menjadi Ideologi Negara, Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa itu diharapkan menjadi pijakan kokoh agar bangsa ini tidak goyah diterpa badai zaman, tetapi dalam waktu yang bersamaan ia juga menjadi pemandu ke masa depan sehingga bangsa ini tidak karam ditelan zaman.

Dalam hal ini Pancasila sebagai fondasi berbangsa akan tetap menjadi pedoman dasar tetapi Pancasila juga harus menjadi perspektif agar bangsa ini tidak kehilangan arah dan larut dalam kemajemukan yang buntu. Pancasila dalam kondisi ini harus tetap memberi arah tentang bagaimana komitmen bersama itu menjadi terobosan baik dalam kehidupan internal berbangsa Indonesia maupun pergaulan antar bangsa di dunia global. Dalam hal internal berbangsa, kompleksitas perilaku anak bangsa akhir-akhir ini mulai menyita perhatian para pemerhati tentang perlunya etika pergaulan yang mencerminkan jati diri bangsa. Hal ini dipandang penting karena pengabaian terhadap perlunya suatu tatapergaulan yang harus menjadi komitmen bersama dapat berakibat fatal yaitu terjatuh pada tata nilai majemuk, ashabiah atau nilai-nilai lain yang menjadi komitmen kelompok dan kepentingan masing-masing. Di sinilah letak urgensinya Pancasila menjadi perspektif bagi anak bangsa agar tidak kehilangan pijakan kini dan di sini serta tidak juga kehilangan arah ke masa depan.

Satu hal penting yang mestinya menjadi sorotan dari perspektif Pancasila adalah etika berbangsa atau agar lebih fokus kita sebut sebagai etika anak bangsa. Berangkat dari kemajemukan dan kompleksitas persoalan yang dipunyai bangsa ini maka nilai-nilai etika yang berkembang dan dikembangkan

² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 14.

juga mempunyai banyak ragam baik yang berasal dari budaya bangsa sendiri maupun nilai-nilai global yang akhir-akhir ini mengalir deras masuk dari luar melalui berbagai saluran dan media. Dalam konteks ini maka baik dan buruk mempunyai ukuran ganda bahkan sangat bervariasi sesuai dengan keyakinan, kebudayaan serta kebiasaan yang melingkunginya. Akibatnya adalah ukuran nilai itu bisa menjadi sangat liar, bermacam-macam dan bisa saja akan mengalami degradasi dan jatuh kepada paham individualistik, hedonistik, liberalistik atau pada nilai-nilai lokal berdasarkan suku, daerah dan kearifan lokal yang hidup dalam setiap komunitas.

Kemungkinan bangsa ini jatuh pada keragaman nilai bukan suatu kekhawatiran kosong yang berlebihan, keragaman nilai itu telah diperlihatkan secara nyata dalam kehidupan keseharian baik melalui cuitan pribadi maupun media masa. Salah satu bentuk dari praktik itu adalah *hoax*. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hoaks adalah berita bohong yang dibuat dengan maksud menutupi berita yang sebenarnya. Jadi memutarbalikkan fakta seolah-olah yang salah itu adalah benar dan benar itu menjadi salah. Setiap hari kita disuguhi berita yang campuraduk sehingga sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang salah.³

Hoaks seolah telah menjadi sebuah pola kehidupan baru yang diterima apa adanya di luar control nalar kritis. Bahkan sebagian masyarakat menganggap hoaks sebagai gaya hidup yang legal dan membanggakan. Memutarbalikkan fakta dan menyebarkan kebohongan bagi mereka adalah hak individual atau privasi yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Sampai di sini barangkali masih dipandang sebagai fenomena biasa dan sesaat yang pada waktunya akan berlalu dengan sendirinya. Namun jika ditelisik lebih dalam maka akan semakin memprihatinkan karena fenomena hoaks itu sesungguhnya adalah puncak gunung es dari standar nilai yang semakin jauh dari jati diri bangsa Indonesia yang pancasilais. Melihat kenyataan yang memprihatinkan seperti itu maka menghadirkan Pancasila sebagai perspektif memperoleh signifikansinya. Khusus dalam bidang etika, yang akan dibidik adalah mindset dan perilaku anak bangsa untuk bagaimana dapat berpikir dan berperilaku sesuai dengan Pancasila.

B. Etika

³ Thoriq Tri PRABOWO, *MEMPEREBUTKAN RUANG PUBLIK VIRTUAL Literasi, Hoax, dan Perdamaian* (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020), 90, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39933/>.

1. Etika

Dalam khazanah kefilosofan, etika diposisikan sama dengan metafisika, logika dan retorika yang dihimpun dalam rumpun filsafat sistematis. Di sini etika masuk sebagai cabang filsafat dan mendapat perhatian serius dari para filosof semenjak zaman Yunani kuno sampai zaman modern bahkan zaman postmodern seperti sekarang ini. Dalam perkembangannya, Etika, logika dan metafisika menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai ilmu maka masing-masing tertutup pada dirinya sendiri, tetapi pada sisi yang lain, ilmu-ilmu ini juga memiliki kemanfaatan praktis yang kadang mempunyai keterkaitan secara fungsional dengan ilmu-ilmu lainnya. Itulah sebabnya logika disebut sebagai ilmu tetapi disebut juga sebagai cara berpikir, kemudian etika kita kenal dengan etika normatif dan etika praktis. Etika normatif membicarakan hukum-hukum atau norma-norma umum untuk memberi gambaran kepada manusia sebagai pelaku etik tentang ruanglingkup dan batas-batas yang harus diketahui agar dalam tindakannya tidak menerobos piranti-piranti moral yang telah disepakati. Di sini berarti pembicaraan pada tingkatan ilmu. Sedangkan etika praktis lebih fokus pada penerapan norma-norma tersebut dalam sepekan terjang keseharian manusia. Etika model ini sering disebut dengan etika terapan, terutama berkaitan dengan bidang-bidang tertentu dalam kehidupan manusia. Hal itu dapat dipahami karena etika terapan ini berkembang sangat pesat akhir-akhir ini karena berbagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

K. Bertens membagi etika menjadi tiga bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu etika deskriptif, etika normative dan metaetika. Etika deskriptif membahas perilaku moral dalam arti yang seluas-luasnya menyangkut baik dan buruk dan berkaitan dengan segala situasi seperti adat istiadat, kultur tertentu, lingkungan kebiasaan atau praktik-praktik moral yang mungkin bertentangan dengan kebiasaan pada umumnya. Hal itu disebabkan karena etika deskriptif tidak memberi penilaian terhadap baik atau buruk dari suatu perilaku yang muncul dari komunitas tertentu. Misalnya pada komunitas masyarakat primitif yang kadang-kadang preskriptif perilaku moralnya bertentangan dengan praktik masyarakat modern pada umumnya, namun tetap dikemukakan karena dalam etika deskriptif dilukiskan apa adanya. Berikutnya adalah etika normatif yang lebih aktif dibandingkan dengan etika deskriptif. Etika normatif tidak sekedar melukiskan tingkah laku moral yang muncul dari kebudayaan masa lalu apa adanya seperti pada etika deskriptif, tetapi secara aktif memberi penilaian sebagai tingkah laku moral yang buruk jika bertentangan dengan martabat manusia. Etika

normatif juga disebut dengan etika preskriptif yaitu menolak atau menerima suatu perilaku moral dengan argumentasi, mengapa sebuah tindakan itu ditolak atau diterima dan dinilai sebagai tindakan yang baik atau tindakan yang buruk. Argumentasi itu dibangun berdasarkan norma-norma moral baku dan standar yang harus ditaati. Terakhir adalah metaetika atau disebut juga sebagai etika analitis. Dalam etika ini, yang dipersoalkan bukan tingkah laku moral tetapi adalah keterkaitan antara perilaku dan ungkapan verbal. Model etika ini lebih cenderung kepada analisis bahasa tentang baik dan buruk ketimbang mempersoalkan baik dan buruknya sebuah perilaku.⁴

2. Alur Pikir Dalam Etika

Etika normatif sebagaimana digambarkan di atas memiliki otoritas untuk menyusun argumentasi sekaligus memberi penilaian terhadap suatu perbuatan apakah dimasukkan dalam kategori baik atau buruk. Meskipun etika normatif berada dalam tataran filsafat tetapi penyusunan argumentasi sebagai sebuah standar penilaian tidak terlepas dan dasar pijak dan tujuan akhir yang hendak dicapai. Dalam kaitan inilah maka dalam etika dapat disaksikan berbagai alur pikir atau dapat disebut sebagai aliran pemikiran dalam bidang etika yang masing-masing menawarkan standarisasi yang menurut mereka dapat menjawab persoalan moral dalam setiap tingkah laku manusia.

Alur pikir tersebut, pertama adalah hedonisme. Aliran pikir ini sudah sangat terkenal karena lahir semenjak dua ribu tahun yang lalu dari kegelisahan para filosof Yunani kuno tentang bagaimana sebaiknya manusia mengatur hidupnya. Hedonisme berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah mencari kenikmatan bagi dirinya sendiri dan berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari atau menjauhkan diri dari rasa sedih, kepedihan atau yang menyakiti. Tujuan hidup tersebut kemudian memotivasi manusia untuk aktif mengambil sebanyak-banyaknya kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih nikmat. Dengan mendapat kenikmatan maka manusia merasa puas, kepuasan itu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Terlepas dari pro kontra adanya ungkapan seperti itu tetapi secara alamiah kecenderungan demikian memang telah menjadi watak bawaan manusia semenjak lahir. Orang-orang yang menganut alur pikir ini akan mengukur tingkah laku manusia apakah dinilai baik atau buruk, sangat tergantung pada sejauh mana perbuatan tersebut berdampak pada kenikmatan. Jika perbuatan itu mendatangkan kenikmatan maka dipandang baik, sebaliknya apabila

⁴ K. Bertens, *Etika K. Bertens* (Gramedia Pustaka Utama, 1993), 13.

tidak mendatangkan kenikmatan apalagi mengakibatkan kepedihan maka dihukumkan sebagai perbuatan yang buruk.⁵

Alur pikir kedua adalah utilitarisme yang berpendapat bahwa sebuah perbuatan disebut baik atau buruk bukan terletak pada norma-norma baku seperti berbohong itu buruk, tetapi tergantung dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Jika dalam kenyataannya berbohong itu mendatangkan akibat baik maka berbohong di sini dinilai sebagai perbuatan baik, sebaliknya jika berbohong itu berakibat buruk maka berbohong dipandang sebagai perbuatan yang buruk. Berbeda dengan hidonisme, aliran ini bermaksud untuk mendatangkan akibat baik itu kepada kelompok manusia yang lebih banyak. Oleh karena itu nilai dari suatu perbuatan dinilai baik atau lebih baik sangat ditentukan oleh seberapa besar akibat baik yang ditimbulkan kepada seberapa manusia yang menerima akibat baik itu. Semakin banyak manusia yang dapat mengambil manfaat dari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dinilai lebih baik dari pada perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi sejumlah kecil manusia.⁶

Aliran berikut berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Itu artinya sebuah perbuatan dinilai baik jika mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya suatu perbuatan dihukumkan buruk jika mendatangkan kesengsaraan alias tidak bahagia. Bedanya aliran ini daripada yang lainnya terletak pada bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu. Aliran ini nampaknya sangat terinspirasi oleh eksistensialisme karena kebahagiaan itu harus dicapai dengan cara harus bekerja keras mengembangkan semua potensi diri, Itulah sebabnya aliran ini disebut sebagai aliran pengembangan diri. Dengan bekerja dan selalu mengembangkan diri maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya karena perbuatan yang bertanggungjawab itulah yang membawanya mencapai kebahagiaan. Semakin banyak potensi diri yang dikembangkan atau direalisasikan dalam kenyataan maka semakin besar kebahagiaan yang diperoleh. Alur pemikiran ini mendorong manusia untuk selalu aktif, selalu maju bahkan mencari tantangan karena semakin banyak tantangan yang bisa dilewati maka semakin banyak juga potensi diri yang teraplikasi dan hal itu berarti semakin banyak kebahagiaan yang diraih⁷

Terakhir adalah deontologi yang mendasarkan pandangannya pada perbuatan, terlepas dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Ada

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 113.

⁶ Magnis-Suseno, 122.

⁷ Magnis-Suseno, 118.

perbuatan yang dilakukan karena adanya konsekuensi mendapatkan sesuatu tetapi ada perbuatan yang dilakukan karena perbuatan itu sendiri. Memakai istilah Immanuel Kant, yang pertama disebut sebagai imperatif hipotetis dan yang kedua disebut sebagai imperatif kategoris. Imperatif hipotetis mengandaikan persyaratan, jika begini maka akan begitu, saya menolong maka saya layak mendapat imbalan sedangkan imperatif kategoris tanpa persyaratan karena saya menolong sebagai sebuah kewajiban. Saya wajib menolong karena memang saya berkewajiban untuk menolong dengan tanpa berpikir mendapat imbalan atau konsekuensi apapun dari perbuatan saya menolong itu. Sebagaimana dikutip oleh Endang Daruni Asdi, Kant mengatakan bahwa melakukan perbuatan baik itu bukan karena orang mempunyai kemauan untuk melakukan kebaikan tetapi melakukan perbuatan baik itu adalah karena perbuatan baik itu menjadi kewajiban bagi seseorang untuk melakukan perbuatan itu.⁸

3. Etika dan Moralitas

Etika sebagaimana diuraikan di atas memiliki persinggungan dengan moralitas terkait nilai baik dan buruk. Dalam hal ini etika sebagai nilai praktis bukan normatif. Etika normatif biasanya dipandang sebagai ilmu yang berbicara tentang norma-norma atau bahkan diposisikan sebagai filsafat yang mengkritisi nilai dan norma tersebut. Dalam konteks tertentu etika dan moral disejajarkan seperti yang diperkenalkan oleh Cicero dan Aristoteles, di lain sisi dipisahkan sebagaimana diperkenalkan oleh Santayana yang memandang etika sebagai suatu disiplin yang rasional sementara moralitas bersinggungan dengan adat istiadat dan kebiasaan.⁹ Dalam tulisan ini etika dan moral tidak terpisahkan tetapi moral ditempatkan sebagai bagian dari etika yang berhubungan dengan tingkah laku manusia yang telah mengkristal dalam bentuk kebiasaan dan telah menjadi adat istiadat yang selanjutnya berfungsi sebagai mindset dalam membentuk perilaku dari komunitas tertentu khususnya yang berkaitan dengan penilaian baik dan buruk dari sebuah perbuatan.

Moralitas dari bahasa Inggris morality, dari bahasa Latin moralis yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tingkahlaku, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup. Semua pengertian itu berkaitan dengan kaidah dan aturan yang

⁸ Endang Daruni Asdi, "Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant," *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (November 15, 2007): 12, <https://doi.org/10.22146/jf.31607>.

⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Ed. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 674.

mengatur tingkahlaku manusia dalam sebuah masyarakat, yang dengan demikian bisa dihukumkan pada diri seseorang tentang nilai baik dan nilai buruk secara individu maupun kelompok. Baik dan buruk dalam moral merupakan implementasi dari sebuah aturan main yang berlaku dalam masyarakat tertentu tetapi implementasi dalam sebuah perbuatan senantiasa meniscayakan adanya kehendak bebas dari individu di dalam mengekspresikan aturan tersebut. Tanpa kehendak bebas maka ketaatan terhadap suatu aturan moral akan menjadi tidak bermakna.

Menaati aturan tanpa kehendak bebas ini yang dikecam oleh Nietzsche dan menamakannya sebagai moralitas budak. Dalam moralitas ini seseorang dipandang bermoral jika menerima sebuah norma sebagai tindakan baik meskipun dirinya tertindas. Mereka berkeyakinan bahwa yang menerima ketertindasan itu lebih baik dari yang menindas, sehingga secara suka rela meredam emosi dan menerima keadaan sebagai sikap yang terpuji. Dalam hal ini ia mengecam moralitas kristiani yang bertolak dari perasaan lemah di mana kelemahan dan kepasifan dianggap sebagai nilai tertinggi. Bertolak belakang dengan sikap ini oleh Nietzsche disebut sebagai moralitas tuan yang diberi nama sebagai manusia super. Moralitas seperti ini dibangun di atas sikap menumbuhkan optimisme yang melampaui nilai-nilai tradisional tentang moralitas. Dalam kaitan ini nilai-nilai yang dikembangkan dari keputusan individual secara bebas memiliki nilai yang tinggi sehingga manusia benar-benar menjadi tuan di dalam menentukan nilai perbuatannya secara bertanggung jawab.¹⁰

C. Pancasila

1. Bentuk dan isi Pancasila

Pancasila seperti yang kita kenal sekarang ini memiliki rangkaian historisitas yang panjang, sepanjang perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajah, bahkan secara ruhaniah telah tertanam jauh di lubuk hati setiap manusia Nusantara ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Untuk mendasari kemerdekaan yang akan diproklamasikan sebagai hasil akhir dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia maka para pendiri bangsa berupaya untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama yang dapat dijadikan dasar Negara dan sebagai landasan pijak sekaligus menjadi ideologi, falsafah dan

¹⁰ Bagus, 677.

pandangan hidup bangsa. Kesepakatan itu yang kemudian muncul sebagai Pancasila.

a. Bentuk Pancasila

Yang dimaksud dengan bentuk Pancasila di sini adalah susunan sila-sila yang di rumuskan oleh BPUPKI di dalam sidang-sidang sampai mencapai hasil yang final sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana suasana psikologi pada pendiri bangsa ketika itu sudah bisa dibayangkan dari munculnya bentuk Pancasila dalam beberapa susunan yang berbeda. Hal itu menggambarkan keseriusan hebatnya perdebatan di antara anggota sidang yang sudah barang tentu ingin memberikan sumbangsiah terbaik bagi bangsa tercinta. Dua tokoh yang berhasil merumuskan bentuk Pancasila itu adalah Mohammad Yamin dan Soekarno. Mohammad Yamin mengemukakan susunan Pancasila sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Sementara Soekarno juga mengemukakan lima poin yang diharapkan dapat menjadi dasar Negara. Lima poin tersebut adalah:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Dari catatan kedua tokoh anggota sidang tersebut, dibentuklah panitia perumus yang terdiri dari Sembilan orang yang kemudian dikenal sebagai tim Sembilan. Susunan yang berhasil dirumuskan oleh panitia Sembilan adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Susunan terakhir ini yang dikenal dengan Piagam Jakarta.¹¹ Rumusan dari panitia Sembilan ini pun belum dapat diterima sebagai hasil final karena sejumlah protes yang datang dari perwakilan warga masyarakat Indonesia Timur, terutama pada poin satu. Protes tersebut direspon oleh PPKI dengan menghapus kata-kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan demikian maka rumusan finalnya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Lima poin tersebut yang oleh Soekarno diberi nama Pancasila artinya lima asas atau dasar. Itulah Pancasila yang sekarang menjadi Dasar Negara.¹²

A. Isi Pancasila

Yang dimaksud dengan isi Pancasila di sini adalah budaya, adat istiadat, perilaku keberagamaan, sopan santun, saling menghormati, saling tolong-menolong, gotongroyong dan sifat-sifat terpuji lainnya yang telah tertanam, hidup dan mengakar dalam masyarakat nusantara, bahkan nilai-nilai tersebut telah ratusan tahun berada dalam hati sanubari setiap orang yang menghuni kawasan kepulauan ini. Sifat-sifat dasariah inilah yang digali dan dirumuskan dalam susunan yang lebih sistematis sebagaimana kita saksikan di atas. Dalam konteks hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, rumusan di atas kemudian diupayakan untuk secara terukur dapat masuk dalam berbagai lini kehidupan menjadi terjiwai dan bahkan menjadi way of life. Ini artinya Pancasila yang tadi berupa material atau Pancasila material dirumuskan menjadi Pancasila formal dan akhirnya menjadi Pancasila operasional.¹³

b. Pancasila sebagai Dasar Negara

Perumusan Pancasila sebagai mana diuraikan di atas, telah mengalami berbagai proses yang berliku dan panjang untuk mendapatkan kesepakatan dari segenap komponen bangsa. Kesepakatan itu diperlukan karena Pancasila

¹¹ Saifuddin Anshari and M Solihat, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1959)*, 1997, 30.

¹² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Ed. 6 (Yogyakarta: Paradigma, 2002), 23.

¹³ P. J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila Dengan Pendekatan, Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 14.

yang telah menjadi jati diri bangsa itu akan menjadi dasar Negara yang akan dibangun setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pancasila sebagai dasar Negara memberi isyarat bahwa harus ada kesesuaian antara dasar dengan yang didasarkan atau dengan kata lain harus bersesuaian antara yang didasarkan dan dengan dasarnya sendiri. Hal itu berarti harus ada kesesuaian antara Pancasila sebagai dasar Negara dan Negara sebagai yang berpijak di atas dasar itu, artinya tidak boleh ada pertentangan antara Negara Indonesia dengan Pancasila. Dalam konteks ini, hubungan antara Pancasila dan Negara adalah hubungan sebab akibat karena Negara Indonesia tidak mungkin terwujud tanpa adanya Pancasila yang di dalamnya terdapat unsur pokok pembentuk Negara itu sendiri. Unsur pokok yang dimaksud adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Negara Indonesia bisa terwujud karena adanya manusia sebagai modal awal, manusia yang telah menempati kepulauan Nusantara. Untuk bisa mencapai kemerdekaan dan membentuk Negara maka manusianya harus bersatu. Manusia yang bersatu dalam Negara itu disebut rakyat dan rakyat itu berusaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu keadilan dan semua itu hanya bisa terjadi karena berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Pancasila sebagai dasar Negara juga bermakna seluruh perangkat, kebijakan, tindakan, aturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan bernegara harus sesuai dengan Pancasila sebagai landasannya. Dalam hal ini Pancasila menjadi pedoman dan sumber dari seluruh sumber hukum yang berlaku di Indonesia baik bentuk maupun isinya. Seluruh produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak saja menyalahi komitmen Pancasila sebagai dasar Negara tetapi juga bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Akibat dari produk hukum seperti itu akan segera mengundang polimik, bahkan perlawanan dari masyarakat tanpa harus digerakkan oleh kekuatan atau kelompok tertentu. Contoh yang paling mutakhir dari produk hukum seperti itu adalah omnibus law yang sering diistilahkan dengan undang-undang sapu jagat. Salah satu bagian dari undang-undang tersebut melegalkan investasi untuk membangun pabrik minuman keras. Tanpa menunggu waktu yang lama, protes masa bermunculan di mana-mana, hampir di seluruh daerah di tanah air termasuk dari daerah yang akan ditempati pabrik minuman keras tersebut.

c. Pancasila sebagai ideologi

¹⁴ Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Cet. 1, Pustaka Filsafat (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 43.

Setiap manusia yang hidup memiliki keinginan, cita-cita dan harapan untuk menikmati suasana masa depan yang lebih baik dari kondisi yang sedang dialami. Harapan tersebut yang mendorong manusia untuk berusaha, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok bahkan secara luas sampai pada tingkat Negara. Cita-cita dan harapan bersama itu kemudian mengkristal membentuk sebuah konsep yang diyakini secara bersama-sama, mampu mempengaruhi mindset dan melahirkan gerakan menjadi sebuah kekuatan yang dapat mendinamisasi seluruh anggota kelompok untuk bekerja keras mewujudkan cita-citanya.

Dari situlah awal munculnya konsep ideologi yang dalam banyak kasus berhasil mengubah jarum jam sejarah bahkan dari sesuatu yang pada awalnya dianggap tidak mungkin tetapi ternyata terwujud seperti yang diharapkan. Hal itulah yang terlihat jelas pada awal masa modern yang mengaitkan perjuangan mereka dengan perlawanan dominasi kekuasaan abad pertengahan. Kecurigaan bahwa kaum agamawan sengaja mempertahankan masyarakat dalam kebodohan untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka semakin mengkristalkan ide-ide kaum pembaharu dalam bentuk ideologi yang didasarkan atas ilmu pengetahuan. Fase berikut tentang perkembangan ideologi ini kemudian mendapatkan bentuknya yang lebih kongkrit terlihat pada pikiran-pikiran Marx dalam melawan kaum borjuis¹⁵

Dari uraian singkat di atas sudah dapat kita pahami bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah tidak dapat dilepaskan dari ide-ide dasar yang telah mengkristal dan menjadi daya dorong bagi sebuah kekuatan pendobrak sehingga sampailah bangsa ini pada kemerdekaannya. Ide-ide dasar itu yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari sudut pandang itulah maka perbincangan tentang Pancasila kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak jarang kita temui ungkapan Pancasila sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai falsafah Negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai cita-cita luhur dan Pancasila sebagai ideologi Negara. Ungkapan-ungkapan tersebut dapat dijelaskan secara sendiri-sendiri, tetapi juga dapat dirangkum dalam sebuah pengertian global yang mencakup cita-cita, harapan, tujuan, cara berpikir dan cara bertindak. Dari sisi kesejarahan, Pancasila lahir dari dan dalam sebuah pergumulan politik yang melibatkan berbagai latarbelakang pemikiran, berbagai kepentingan dan harapan dari lahirnya sebuah organisasi besar yaitu Negara Republik Indonesia.

¹⁵ Jorge Larrain et al., *Konsep ideologi* (Yogyakarta: LKPSM, 1996), 31.

Oleh karena itu kedudukan Pancasila sebagai suatu ideologi sudah merupakan sebuah keniscayaan semenjak lahirnya. Meskipun demikian, Pancasila harus dipandang sebagai suatu ideologi yang tidak ideologis. Hal ini perlu dijelaskan agar tidak disalahpahami karena ideologi sebagaimana terjadi di belahan bumi yang lain menuntut sebuah ketaatan yang sangat mengikat, kongkrit dan rigid. Kondisi seperti itu sudah tentu sangat berbeda dengan Pancasila. Pancasila hanya memuat ide-ide yang sangat mendasar sementara pelaksanaannya diwadahi dalam rumusan-rumusan tersendiri yang sesuai dengan kondisi watak dan kepribadian bangsa Indonesia.¹⁶

d. Pancasila sebagai Perspektif Etik

Selain sebagai ideologi, Pancasila juga sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dalam kedudukannya sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa maka Pancasila sesungguhnya adalah perspektif bagi kehidupan berbangsa, baik keluar maupun ke dalam. Keluar artinya menjawab tantangan sekaligus menjadi filter bagi kehadiran ideologi-ideologi dari luar yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia, ke dalam artinya menjadi pijakan, tujuan dan sekaligus menjadi standar nilai bagi perilaku anak bangsa. Dalam tulisan ini Pancasila diposisikan sebagai kaca mata etis untuk mengamati perilaku anak bangsa dalam berbagai lini kehidupan. Artinya setiap tingkah laku moral dari warga Negara akan diukur kesesuaiannya apakah mencerminkan pengamalan Pancasila atau tidak.

Atau dengan kata lain bahwa perilaku anak bangsa seharusnya mengamalkan Pancasila dalam setiap tindakan moralnya. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesungguhnya merupakan landasan, tujuan dan standar etik bagi bangsa Indonesia.

Sila pertama mengandung nilai-nilai etik Ketuhanan yang merupakan komitmen bersama dari semua agama. Semua agama dengan berbagai ragam ajarannya menyatakan setuju atas nilai-nilai ketuhanan yang harus diimplementasikan dalam seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan nilai-nilai ketuhanan itu, semua agama mengajarkan kebaikan, sehingga sebuah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, secara etis dipandang buruk, sebaliknya perbuatan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut dipandang sebagai perbuatan baik. Dengan

¹⁶ Wahana, *Filsafat Pancasila*, 88.

demikian maka nilai-nilai ketuhanan itu selain sebagai landasan pijak, ia juga menjadi standar penilaian tentang etis tidaknya sebuah perbuatan. Hal yang sama terjadi juga pada sila kedua.

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang oleh semua komponen anak bangsa bersepakat bahwa nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan pijak sekaligus menjadi parameter ukuran penilaian atas sebuah perbuatan. Perbuatan yang bersesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan maka dianggap baik dan sebaliknya perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut dianggap sebagai buruk.

Sila ketiga persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai pemersatu. Jika suatu perbuatan tidak mempersatukan tetapi membawa akibat pemecah-belah dalam masyarakat, disintegrasi dan yang sejenisnya maka perbuatan tersebut dipandang buruk, sebaliknya jika perbuatan itu membawa akibat semakin kokohnya persatuan maka perbuatan tersebut dipandang baik. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung nilai-nilai musyawarah, sehingga perbuatan yang otoriter dan bertentangan dengan nilai-nilai musyawarah dianggap jelek, sebaliknya perbuatan yang sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dianggap baik. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disepakati mengandung nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan itu yang akan dituju dari komitmen bernegara tetapi juga sebagai landasan dan ukuran etik bagi sebuah perbuatan warga negara. Jika perbuatan itu sebagai implementasi keadilan maka dipandang baik, jika sebaliknya maka dipandang buruk.

2. Pancasila dan Wawasan Moral Anak Bangsa

Sudah disinggung di atas bahwa Pancasila dalam kedudukannya sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa maka pada hakikatnya ia adalah perspektif untuk menuntun anak bangsa dalam setiap tingkahlakunya. Dalam tulisan ini, perspektif itu diarahkan untuk memotret perilaku moral anak bangsa dalam konteks kehidupan bersama. Sebagaimana dipahami bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan sebagai makhluk sosial selain, sudah tentu sebagai makhluk individual. Dalam posisinya sebagai makhluk sosial inilah sesungguhnya memerlukan pedoman bersama yang disepakati secara bersama dan untuk mengatur kehidupan bersama.

Di sinilah letak signifikansi kehadiran Pancasila sebagai pedoman bersama yang disepakati itu. Dalam hal Pancasila sebagai perspektif etis maka kelima sila dalam Pancasila harus diletakkan dalam satu tarikan napas, tidak

terpisah-pisah antara satu sila dengan sila lainnya.¹⁷ Dari situlah kemudian muncul standar penilaian untuk mengukur setiap perbuatan anak bangsa apakah perbuatan itu dihukumkan baik atau buruk. Artinya kelima sila tersebut harus dipergunakan secara bersama-sama untuk mengukur suatu perilaku.

a. Perilaku Politik

Perilaku politik birokrasi pemerintahan harus menjadi sasaran bidikan awal dari moral Pancasila, karena di tangan birokrasi itulah terletak nasib dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan birokrasi pemerintahan sesungguhnya adalah suatu kebutuhan untuk mewadahi cita-cita kemerdekaan yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang berbeda dengan tatanan kehidupan pada masa penjajahan asing. Tatanan masyarakat yang dimaksud adalah kemakmuran dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat. Namun dalam perkembangannya berokrasi bisa berjalan dengan caranya sendiri menciptakan piranti-piranti sedemikian rupa sehingga birokrasi itu mejadi lembaga yag sakral, bahkan menakutkan. Dalam kondisi seperti ini maka birokrasi tidak lagi berorientasi pelayanan utuk menjawab problematika kehidupan rakyat tetapi berorientasi kekuasaan sehingga melayani rakyat yang menjadi tugas utamanya justru terabaikan.¹⁸

Bentuk birokrasi seperti ini bisa disebut sebagai birokrasi kekuasaan yang berkebalikan dengan birokrasi pelayanan. Birokrasi kekuasaan yang secara teoritis banyak dikaitkan dengan teori Weber tentang hierarki kekuasaan, menempatkan pejabat sebagai pemilik kekuasaan pada lingkup jabatannya. Hal itu mengundang banyak kritik dan disebut sebagai kerajaannya para pejabat. Dalam hierarki kekuasaan itu, hierarki yang lebih tinggi mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibanding dengan hierarki yang ada di bawahnya. Semakin ke atas jenjangnya semakin besar kekuasaannya dan semakin ke bawah jenjangnya semakin kecil lingkup kekuasaannya. Jenjang yang paling bawah dari sstem ini adalah rakyat yang tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Akibatnya sudah dapat diduga bahwa tindakan dari jenjang yang lebih rendah harus mendapat persetujuan dari jenjang yang lebih tinggi. Dalam perkembangannya, birokrasi seperti ini melahirkan mitos tentang sakralnya kekuasaan. Kekuasaan itu berpusat pada pejabat,

¹⁷ Anton Bakker, *Ontologi atau metafisika umum: filsafat pengada dan dasar-dasar kenyataan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 38.

¹⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2014), 161.

sehingga seorang pejabat itu bisa sangat ditakuti, ia bukan berorientasi untuk melayani tetapi malah minta dilayani.

Di Indonesia, jenjang kekuasaan ini diperparah dengan budaya minta restu dan asal bapak senang, bahkan semua urusan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tergantung pada pejabat. Akibat lebih lanjut adalah semua masyarakat berlomba-lomba untuk mendekati kepada pejabat, setor muka, bahkan menjilat untuk mendapatkan rezeki.¹⁹

Gambaran birokrasi seperti di atas memperlihatkan betapa mendesaknya implementasi nilai-nilai etik Pancasila dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Belum lagi berbicara tentang perilaku elit partai politik yang secara kasat mata mempertontonkan egoisme kelompok dan kepentingan-kepentingan sesaat di luar tugas dan misi utamanya. Fenomena mahar politik dari setiap bakal calon kepala daerah maupun bakal calon anggota legislatif kepada partai politik dan politik uang dalam setiap pemilihan mengindikasikan etika bangsa ini semakin rapuh. Biaya politik yang sangat tinggi membuat upaya pemberantasan korupsi seperti berjalan di tempat, tidak mengalami kemajuan yang berarti. Belum lagi memperhatikan perilaku wakil rakyat di parlemen yang tidak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat banyak. Wakil rakyat di senayan tidak jemu-jemu membuat gaduh dalam melahirkan peraturan yang justru menciderai kepercayaan dan kepentingan rakyat. Perdebatan yang terjadi di gedung rakyat yang seharusnya untuk kepentingan rakyat tetapi yang terjadi adalah memperjuangkan kepentingan para elit politik baik elit partai maupun elit birokrasi. Bahkan tidak jarang terjadi mereka melahirkan perundang-undangan yang melukai rasa keadilan masyarakat.²⁰

Mencermati perilaku elit politik di tanah air saat ini, mengingatkan kita pada upaya pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pada berbagai kesempatan para pendiri bangsa ini mengingatkan kita tentang perlunya kembali kepada jati diri bangsa agar kita tidak tercerabut dari akar spiritualitas yang telah tertanam di bumi pertiwi ini. Pancasila disebut sebagai akar spiritualitas karena mengamalkan Pancasila sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan penampilan fisik, penampilan fisik itu adalah implementasi, tetapi yang sesungguhnya harus terjadi adalah Pancasila menjadi spirit hidup. Dengan menjadi spirit hidup maka Pancasila tidak lagi memerlukan penekanan dari luar untuk mengamalkannya tetapi sudah menajdi

¹⁹ Thoha, 6.

²⁰ A. Bakir Ihsan, *Etika Dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis Atas Etika Politik, Kekuasaan, Dan Demokrasi*, Cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 20.

panggilan hati nurani untuk mengamalkan Pancasila. Kasus-kasus seperti di atas menunjukkan bahwa Pancasila belum menjadi akar spiritualitas dalam bidang politik. Ketika cahaya Pancasila itu muncul dalam bentuk spiritualitas yang menyinari perilaku anak bangsa maka perilaku yang ditampilkan akan mencerahkan. Pencerahan itu akan menuntun birokrasi menjadi birokrasi pelayanan sebagai lawan dari birokrasi kekuasaan.²¹

Dalam hal birokrasi pelayanan ini, peraturan yang dibuat semenjak awal telah berorientasi dan sudah diarahkan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dibimbing oleh cahaya spiritualitas Pancasila tadi akan tampak pada pelayanan yang lebih dari sekadar memenuhi tugas dan fungsi birokrasi. Birokrasi model ini akan terlihat mulai dari Perundang-undangan, peraturan-peraturan di bawahnya, petunjuk pelaksanaan sampai petunjuk teknisnya sudah searah dan terus ke bawah sampai sumberdaya manusia, bahkan prasarana dan sketsa lingkup ruang kerja. Semua lini itu akan dibuat setransparan mungkin sehingga alur pelayanan dipahami oleh semua stakeholder yang memerlukan pelayanan. Dengan demikian maka seperti yang disebutkan di atas bahwa pelayanan itu bukan lagi hanya memenuhi fungsi birokrasi tetapi melayani dengan menampilkan perilaku ingin membantu, ingin agar orang yang dilayani merasa nyaman, merasa diorbankan, merasa terlayani, merasa terbantu, merasa dimudahkan maka muncul slogan jika bisa dimudahkan mengapa harus dipersulit, bukan sebaliknya jika bisa dipersulit mengapa harus dipermudah.²²

Sama halnya dengan elit politik baik petinggi partai maupun para wakil rakyat di parlemen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggara negara, harus menaruh perhatian lebih pada pengamalan Pancasila dalam kaitan dengan moralitas bangsa. Pengabaian terhadap hal itu akan semakin memperkeruh carut marut dunia perpolitikan tanah air yang akan bermuara pada kesengsaraan rakyat. Implementasi moralitas Pancasila pada ranah perpolitikan akan menuntun para elit politik untuk menampilkan perilaku yang lebih bermartabat sehingga citra perpolitikan di tanah air lebih menampilkan wajah yang manusiawi. Moralitas Pancasila itu akan menghindarkan para elit dari praktik politik uang yang kini telah menjadi rahasia umum. Adalah suatu kesesatan berpikir yang tidak terperikan jika kita mengira bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan di atas praktik politik uang. Undang-undang pemilu tentang pemilihan langsung yang

²¹ Djon Pakan, *Kembali! Ke Jati Diri Bangsa: Menegakkan Sumpah Pemuda, Pancasila, Proklamasi, UUD 1945* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), 259.

²² Johannes Haryatmoko, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 14.

dibuat oleh para elit politik sesungguhnya merupakan suatu awal yang tidak menggembarakan. Politik biaya tinggi yang dipraktikkan oleh elit politik memiliki implikasi yang sangat jauh bagi perkembangan mental anak bangsa. Oleh karena itu kembali kepada jati diri bangsa merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Jati diri bangsa adalah melaksanakan spirit lima sila dari Pancasila dalam sebuah tarikan napas.

Elit politik harus kembali pada kesadaran awal para pendiri bangsa dan kesadaran awal perumusan Pancasila sehingga ukuran moral yang menuntun mereka adalah ukuran moral Pancasila, bukan ukuran moral hedonis, kapitalis bahkan ateis. Menjadikan Pancasila sebagai standar moral berarti elit politik mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan/musyawarah dan nilai-nilai keadilan dalam setiap aktivitas perpolitikan dan keputusan-keputusan politiknya. Artinya setiap tindakan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut harus dipandang buruk dan tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut harus dipandang sebagai tindakan yang baik. Jika politik uang dianggap bertentangan dengan ukuran moral Pancasila maka harus dihukumkan sebagai perbuatan buruk, artinya tidak boleh dipraktikkan, begitupun sebaliknya. Jika prinsip tersebut diterapkan secara konsisten maka dapat dipastikan bahwa politik biaya tinggi, praktik mahar politik, tindakan memperkaya kelompok dan diri sendiri dapat diminimalisasikan jika tidak dapat dihapus sama sekali.

c. Perilaku Ekonomi

Ekonomi dan politik ibarat dua sisi mata uang yang hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Contoh yang paling mencolok dalam berkelindannya ekonomi dan politik adalah pada kasus korupsi yang tidak pernah kunjung selesai bahkan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Korupsi telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa, menggerogoti akar ekonomi kerakyatan dan menjadikan jurang kemiskinan semakin menganga. Sebagaimana disinggung di atas bahwa korupsi ada kaitannya dengan politik biaya tinggi tetapi fenomena tersebut tidak bisa dikatakan lepas dari keserakahan para pelaku untuk memperkaya diri. Korupsi disebut menghancurkan sendi-sendi kehidupan ekonomi karena korupsi tidak berjalan di atas rel perekonomian yang benar, legal dan formal. Korupsi mengabaikan nilai-nilai kejujuran, tenggangrasa dan keadilan. Kasus lain dalam ekonomi seperti kongkalikong antara penguasa dan pengusaha, juga tidak bisa dipandang remeh karena setali mata uang dengan korupsi bahkan lebih parah lagi. Kolusi penguasa dan pengusaha itu bukan

saja menyangkut uang tetapi bisa dari hulu sampai ke hilir, dari perundang-undangannya, peraturan teknisnya sampai manipulasi angka dalam kuitansi.²³ Kasus-kasus mutakhir seperti ekspor benih lobster yang melibatkan pejabat kementerian kelautan dan penyalahgunaan bantuan sosial covid 19 adalah dua kasus besar yang menandai proses kolusi antara penguasa dan pengusaha. Dampaknya bukan saja penghambur-hamburan uang Negara pada sasaran yang salah, tetapi lebih dari itu menyengsarakan masyarakat miskin yang menjadi tujuan dan sasaran dari bantuan tersebut.

Kasus lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah penimbunan sembako atau produk-produk strategis lainnya. Demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, pengusaha baik sendiri-sendiri maupun berkolusi dengan penguasa, tidak jarang melakukan praktik penimbunan produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Penimbunan sembako, penimbunan gas, monopoli impor bahan baku yang diperlukan industri kecil dan menengah dan masih banyak lagi contohnya, merupakan sekelumit kasus yang menghitamkan dunia perekonomian kita. Jika ditelusuri lebih dalam lagi maka dapat diketahui bahwa praktik tersebut bukan hanya semata-mata mengejar keuntungan material, tetapi lebih dari itu adalah pengamalan nilai-nilai kapitalisme dan hedonism di dalam aktifitas ekonomi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus-kasus sejenis ini adalah be-rakar dari mental pelakunya, baik penguasa maupun pengusahanya. Jika demikian maka harus kembali pada tesis lama bahwa para pelakunya yang harus diperbaiki mentalnya. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana caranya? Tentu banyak cara yang dapat ditawarkan untuk mengatasi perilaku-perilaku menyimpang tersebut, mulai dari penegakkan hukum secara keras tanpa pandang bulu, pemiskinan para koruptor, menjatuhkan sanksi sosial terhadap pelanggarnya dan barangkali masih banyak lagi deretan usulan dan jalan keluar. Namun demikian, cara-cara berupa tekanan dari luar selama ini dipandang belum atau tidak efektif untuk mengatasi kasus-kasus luar biasa seperti di atas. Dengan demikian maka cara itu harus dicari dan diangkat dari kepribadian bangsa sendiri yang datangnya dari dalam, mengakar dan langgeng, yaitu Pancasila.

Dalam hal ini Pancasila harus masuk secara mendasar dalam praktik ekonomi, masuk ke dalam sistem, bahkan masuk ke dalam khazanah mental

²³ Haryatmoko, 179.

palaku bisnis atau penguasa pemegang kendali perekonomian.²⁴ Kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila harus terimplementasikan sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan internal yang mengendalikan pikiran, sistem, bahkan perundang-undangannya. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi kesadaran individu dan kolektif sehingga praktik ekonomi yang semula menjadi kegiatan keseharian untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumtif, berubah menjadi kegiatan yang bernuansa teologis.

Bernuansa teologi itu artinya aktifitas tersebut berada dalam pengawasan Tuhan, pengawasan yang telah terinternalisasi dalam nurani. Kemudian nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab harus diimplementasikan dalam kesadaran kekitaan, bukan kami dan kamu atau aku dan engkau. Kesadaran ini membawa pada rasa yang sangat mendalam bahwa jika aku mendhalimi orang lain, baik konsumen atau sasaran dari bantuan sosial yang disasarkan kepada sasaran yang tidak benar maka yang terdhalimi itu adalah diriku sendiri. Selanjutnya nilai Persatuan Indonesia. Sebagaimana hierarki Pancasila yang saling menjiwai maka sila Persatuan Indonesia ini dijiwai oleh dua sila sebelumnya yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, penerapan sila yang ketiga ini haruslah bernuansa teologis dan bernuansa kemanusiaan.

Dari sudut pandang itu maka perilaku ekonomi harus diletakkan sebagai perekat antara konsumen dan produsen, antar individu, antar lembaga, antara pemerintah dan rakyat, bahkan antara yang kaya dan yang miskin. Sama halnya dengan ketiga sila di atas, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga memberikan isyarat yang sangat kuat tentang perlunya ekonomi bangsa ini ditata dalam bingkai dan nuansa Pancasila. Dua sila terakhir ini sangat berkaitan dengan praktik ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat. Penerapan nilai keadilan dan kerakyatan dalam etika ekonomi akan melenyapkan praktik penghisapan, pemerasan dan ketidakadilan terutama dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.²⁵

d. Perilaku Media Sosial

Penguatan peran media sosial di era informasi sekarang ini sangat signifikan. Siapa yang menguasai media sosial sama dengan menguasai dunia.

²⁴ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila: sebuah pendekatan sosio-budaya*, Cet. 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 168.

²⁵ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 73.

Dalam alurnya yang positif, media sosial sangat diperlukan karena informasi saat ini telah menjadi kebutuhan primer masyarakat modern. Haus akan informasi pada manusia modern telah terpenuhi oleh kehadiran berbagai media yang menjamur dan telah memberi berbagai varian pengetahuan yang diperlukan bagi kesejahteraan manusia. Namun sisi terang itu dibarengi juga oleh sisi gelap media yang akhir-akhir ini semakin nampak dipermukaan, bahkan dipertontonkan sebagai kebanggaan. Sebut saja kasus hoax yang perkembangannya semakin pesat dari hari ke hari. Rasanya di luar perkiraan bahwa penyebaran fitnah lewat media sosial mendatangkan dampak yang luar biasa mengerikan. Orang menyebut ibarat pisau bermata dua, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Atau ibarat pisau, bisa berfungsi untuk mengupas buah tetapi bisa juga untuk menusuk jantung manusia. Semua ungkapan tersebut ingin memunculkan kekuatan media sosial sebagai arus utama kecenderungan manusia modern.²⁶

Semua pemangku kepentingan berlomba-lomba menggunakan jasa media sosial untuk menyampaikan misinya. Belum lama kita dihadapkan pada iven nasional pemilihan Presiden dengan berbagai hiruk-pikuknya. Dalam waktu bersamaan masing-masing kubu menyampaikan visi, misi dan programnya. Cara ini diyakini sangat efektif menarik simpati dan perhatian pemilih untuk memenangkan kontestasi tersebut. Sampai di sini sudah barang tentu sangat positif karena informasi itu dapat menjangkau berbagai kalangan bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil.

Namun pemandangan yang lain pun tidak kurang ditonjolkan oleh kubu-kubu yang bersaing dengan saling menyerang, menuduh, bahkan memfitnah lawan politiknya. Istilah kadrun, cebong, kampret dan lain-lain adalah model penggunaan media sosial untuk menyampaikan pesan tetapi dengan maksud untuk menyudutkan atau mematikan karakter dari lawan politik. Belakangan muncul istilah buzzer. Istilah ini sebenarnya sudah lama muncul tetapi pemakaiannya secara masif dan merambah dunia perpolitikan dan birokrasi, menurut beberapa kalangan, sesungguhnya terjadi pada iven demo mahasiswa menolak rancangan undang-undang beberapa waktu terakhir. Uraian tentang pemanfaatan media sosial di jalur negatif ini merupakan gunung es yang selalu muncul dan membesar, yang sudah pasti tidak akan berakhir, bahkan menunjukkan tren meningkat dari waktu ke waktu.

Persoalannya adalah bagaimana mengatasi hal itu agar tidak semakin memburuk dan merusak masyarakat terutama generasi milineal, atau sampai

²⁶ William L Rivers, *Media massa & masyarakat modern* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 39.

mendatangkan perpecahan di kalangan anak bangsa. Semua kalangan hampir sependapat bahwa tidak ada cara lain untuk mengatasi dampak negatif itu kecuali harus kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Lima sila dalam Pancasila sesungguhnya adalah piranti etik untuk mengerem lajunya arus negatif media sosial tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, harus dipahami sebagai ketaatan untuk memperbagus informasi atau sebuah keharusan moral untuk menyampaikan informasi yang benar, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya karena jika yang disampaikan adalah informasi yang salah atau bahkan sudah di niatkan untuk menyebarkan fitnah maka perbuatan itu harus dipandang sebagai perbuatan buruk, apapun alasannya. Barangkali bagi penyebar informasi merasa dengan langkah kebohongan itu tujuannya tercapai, tetapi substansi dari perbuatan itu sendiri adalah suatu keburukan karena bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang dianut oleh bangsa ini. Sama halnya dengan sila pertama, sila kedua dari Pancasila juga harus diletakkan sebagai piranti moral dalam berkomunikasi.

Dengan menjadikan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai piranti moral maka informasi yang disampaikan pastilah bermartabat. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang berarti menghindari pemberitaan yang mengarah pada perpecahan sekecil apapun. Setiap pemberitaan di media sosial harus diukur dengan standar persatuan. Jika pemberitaan itu membawa kepada persatuan pada level manapun maka berita tersebut harus dipandang baik tanpa harus melihat dari mana atau dari siapa pemberitaan itu, sebaliknya pemberitaan akan dipandang buruk jika membawa akibat sebaliknya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Piranti moral ini menghendaki pemberitaan yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, kepada masyarakat banyak, bijak dalam pemberitaan bahkan pemberitaan yang dipublikasikan sudah harus melalui musyawarah, telah didiskusikan, telah digodok secara matang sehingga akan memberi manfaat kesejahteraan kepada masyarakat dan bukan sebaliknya. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menuntut perlunya keseimbangan di dalam penyebaran informasi. Informasi yang tidak seimbang atau memonopoli informasi hanya untuk kepentingan satu kelompok tertentu dan merugikan pihak lain harus dipandang sebagai perbuatan yang buruk. Dengan demikian maka yang perlu dikembangkan adalah perilaku sebaliknya, yaitu memberikan informasi yang berseimbangan dan berkeadilan.

C. Kesimpulan

Selain sebagai Dasar Negara, ideologi Negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila juga merupakan kalimatun sawa', titik temu dari tekad anak bangsa untuk secara bersama-sama berada dan hidup bersama dalam sebuah kema-jemukan. Titik itu pula yang seharusnya menjadi perspektif dalam mindset setiap anak bangsa agar komitmen awal itu tetap terjaga dan lestari. Dalam perjalanannya, komitmen dan mindset anak bangsa mulai bergeser pada ti-tik-titik yang ekstrim, baik terhadap ideologi yang datang dari luar seperti liberalisme, kapitalisme, sekularisme dan hidonisme maupun pada faham-faham sempit yang berasal dari daerah, suku, komunitas maupun keyakinan keagamaan kelompok tertentu. Dari sinilah bermula carut-marut tata per-gaulan bangsa yang semakin hari semakin memprihatinkan. Dalam konteks inilah maka tekad untuk mengembalikan Pancasila sebagai kalimatun sawa' itu menjadi sangat fundamental.

Untuk mengatasi masalah di atas maka kalimatun sawa' itu perlu diposisikan sebagai perspektif dan dalam hal ini adalah perspektif etik. Perspektif etik itu dipergunakan untuk membidik tiga bidang yang menjadi arus utama nadi kehidupan saat ini yaitu politik, ekonomi dan sosial media. Dengan me-letakkan Pancasila sebagai perspektif etik secara benar, konsekuen dan ber-tanggungjawab maka praktik politik uang, birokrasi yang korup, kolusi dan monopoli, serta penyebaran informasi yang tidak bertanggungjawab (hoax) dapat diminimalisasikan jika tidak bisa dihilangkan samasekali. Muara dari semua itu dimaksudkan untuk menampilkan Indonesia dalam wajah yang ramah, bermartabat dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, Saifuddin, and M Solihat. *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 sebuah kon-sensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1959)*, 1997.

Asdi, Endang Daruni. "Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant." *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (November 15, 2007): 9–19. <https://doi.org/10.22146/jf.31607>.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Ed. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Bakker, Anton. *Ontologi atau metafisika umum: filsafat pengada dan dasar-dasar kenyataan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Bertens, K. *Etika K. Bertens*. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

- Haryatmoko, Johannes. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi*. Cet. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ihsan, A. Bakir. *Etika Dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis Atas Etika Politik, Kekuasaan, Dan Demokrasi*. Cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Ed. 6. Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- Larrain, Jorge, Tom Bottomore, Ryadi Gunawan, and Ngatawi Al-Zastrow. *Konsep ideologi*. Yogyakarta: LKPSM, 1996.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya; Kajian Sejarah Terpadu. Bag. 2: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Pakan, Djon. *Kembali! Ke Jati Diri Bangsa: Menegakkan Sumpah Pemuda, Pancasila, Proklamasi, UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.
- Poespowardojo, Soerjanto. *Filsafat Pancasila: sebuah pendekatan sosio-budaya*. Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- PRABOWO, Thoriq Tri. *MEMPEREBUTKAN RUANG PUBLIK VIRTUAL Literasi, Hoax, dan Perdamaian*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39933/>.
- Rivers, William L. *Media massa & masyarakat modern*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sumawinata, Sarbini. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Cet. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Suwarno, P. J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila Dengan Pendekatan, Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2014.
- Wahana, Paulus. *Filsafat Pancasila*. Cet. 1. Pustaka Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.